

Pelatihan Green Budget tagging
Day 2
Hotel Swissbel, Ambon, Prov. Maluku
1 Juli 2021

Doddy Afianto – Trainer

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

- Sering menemukan tidak adanya dokumen perencanaan atas keinginan atau tujuan yang ingin dicapai yang menjadi dasar perumusan APBD
- Yang sering ditemukan: membuat APBD baru menyusun RKPDP (*backward step*)
- *Budget tagging* itu melihat penganggaran yang sudah dilakukan sebagai Langkah evaluasi terhadap proses perencanaan selanjutnya.
- *Goals without a plan is just a Wish. A plan without action is just a dream.*
- Perencanaan dan Penganggaran harus menjadi satu kesatuan yang utuh.
- Siklus sederhana yang seharusnya dilakukan dalam pemerintahan adalah
- Plan – Do – Check – Act RPJMD/RKPD – APBD – MONEV – P-RKPD & P-APBD
- Tetapi yang justru banyak terjadi dalam perencanaan adalah terhadap aktivitas yang dilakukan saja, jarang bicara soal evaluasi, tindak lanjut, dan perencanaannya.
- Hal yang sering ditemukan: Memunculkan nama kegiatan yang baru di APBD perubahan/murni tanpa ada dasar perencanaannya. Padahal seharusnya, ketika memunculkan kegiatan baru itu sesuai dengan hasil monev.
- Jadi alur untuk memunculkan kebijakan/kegiatan baru dalam P-RKPD & P-APBD adalah dengan mengevaluasi kegiatan terlebih dahulu, apakah kegiatan/program tersebut berkontribusi pada upaya pencapaian target dalam RPJMD/RKPD. Bila tidak, maka kegiatan tersebut perlu dihapus dan digantikan apabila perlu.
- *Performance scoring*: untuk melihat apakah yang sudah kita laksanakan dengan rupiah yang sudah dikeluarkan, berpengaruh tidak dengan capaian kinerja yang dulu direncanakan.
- Apabila tidak berpengaruh, jangan-jangan ada kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran.
- Arsitektur Dokumen rencana pembangunan daerah

**ARSITEKTUR
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

- Tidak bisa memperbaiki kinerja/memperbesar proporsi *green budget* kalau tidak memperbaikinya dari pangkalnya. Darimana? Renstra dan Renja
- Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah ada dasar perencanaannya.
- Untuk RPJPN 2025-2050 konsepnya akan *green and blue economy*.
- Kalau bisa muncul dalam RPJMD Maluku tentu akan selaras dengan RPJPN tersebut dan tidak sia-sia untuk dipikirkan.

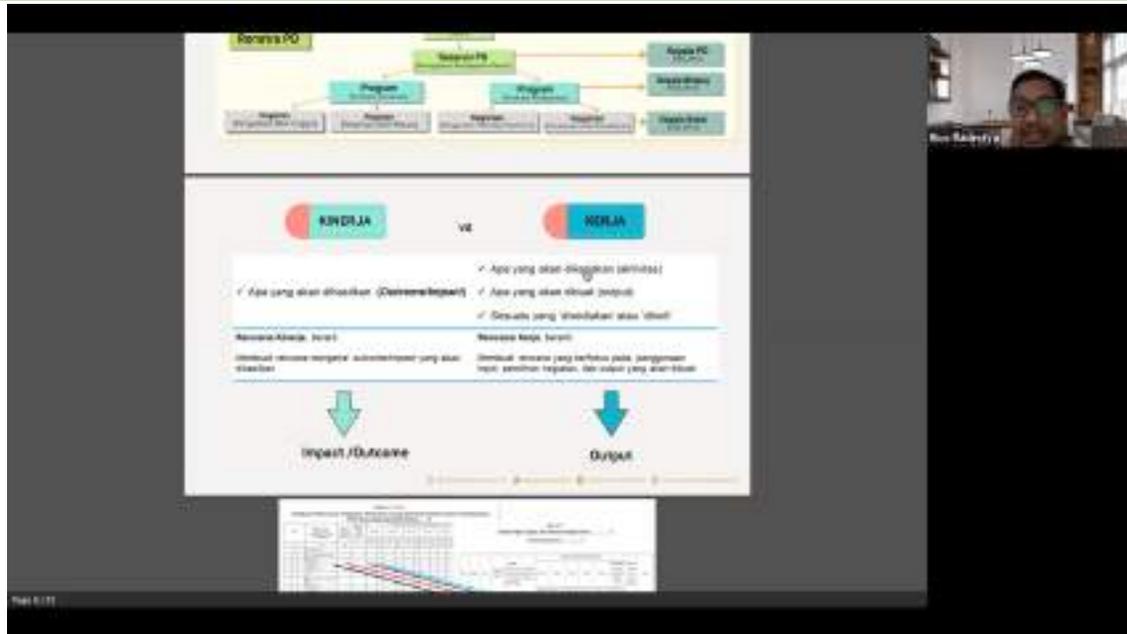
Perencanaan Penganggaran

- *Money Follow Function*
- *It should be Money Follow Program*
- Tapi yang masih sering terjadi adalah *Money Follow Power*

Kesalahan yang sering terjadi dalam perumusan dokumen perencanaan

- Hanya disusun oleh 1 orang
- Tidak mengimplementasikan perencanaan ke dokumen anggaran, dokumen kinerja, dan dokumen laporan.
- Tidak dibaca, hanya ditandatangani oleh kepala OPD dan kepala bidang
- Banyak RKA OPD yang kurang lengkap pengisiannya
- Capaian programnya masih banyak yang belum terukur, tidak sesuai dengan RPJMD
- Masih banyak pengisian tolok ukur kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan kata-kata "tersedianya."
- Contoh pengisian RKA-SKPD yang benar dan mengambil dari Renja adalah sebagai berikut:

- Itulah mengapa penting untuk mencantumkan indikator output dan outcome nya.
- Contoh: Dinas Pendidikan ingin meningkatkan angka partisipasi sekolah anak SMA. Outputnya banyak dibangun di berbagai daerah. Tapi setelah output tersebut tercapai 100%, sekolah banyak dibangun. Namun, outcome (angka partisipasi) tidak naik, stagnan. Artinya, output yang dilaksanakan gagal mencapai outcome. Kebijakan yang disusun Dinas Pendidikan dalam hal pembangunan Gedung sekolah tersebut salah. Itulah gunanya APBD dan RKPD Perubahan. Perlu revisi atas kebijakan tersebut, cari akar penyebab suatu masalah yang ingin diselesaikan tersebut.
- Fungsi APBD perubahan bukan sekedar menggeser anggaran, menggeser kegiatan, tapi bagaimana kita mampu mengevaluasi kebijakan yang sudah disusun mampu meningkatkan outcome kita.
- Fungsi ada indikator dalam RPJMD adalah untuk mengukur kinerja Kepala Daerah.
- Fungsi ada indikator dalam dokumen perencanaan tiap OPD adalah untuk mengukur kinerja Birokrasi.
- Seharusnya, kepala OPD dievaluasi kinerjanya oleh Kepala Daerah melalui capaian kinerjanya indikator sasaran di Renstra.
- Renstra merupakan kinerja Eselon II
- Renstra adalah cikal bakal uang akan dibawa kemana selama 5 tahun, sehingga penyusunannya harus dilakukan dengan sebenar-benarnya.
- Surat edaran KPK no. 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi dalam hal perencanaan penganggaran apa yang sudah direncanakan harus dianggarkan, tidak boleh ada kegiatan baru yang muncul pada proses penganggaran.
- Permendagri 86 tahun 2017: Apabila diharuskan untuk menambahkan kegiatan dan anggaran, harus ada kesepakatan bersama antara ketua DPRD dan kepala daerah sesuai dengan kriteria karena ada kebijakan nasional/provinsi, atau keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Keberhasilan bukan lagi soal seberapa besar anggaran yang terserap, tapi Keberhasilan diukur dari bagaimana *outcome/income* tercapai.
- Beda antara Kerja vs. Kinerja
- Kerja adalah output, contoh: output kerjanya membangun sekolah, tapi kinerja atau outcome nya adalah peningkatan persentase siswa lulus yang masuk universitas, tingkat kelulusan semakin baik.



- Dalam performance scoring, nanti dilihat bagaimana kegiatan yang sudah ditagging hari kemarin dan persentasenya pada pencapaian outcome.
- Contoh pengisian *Performance Scoring* dari dokumen realisasi triwulan I dan II dapat dilihat dalam materi.
- Kalau perencanaan dan penganggaran tidak konsisten (ada perubahan penganggaran yang tidak berdasar), maka tidak dapat dilakukan *performance scoring* atau pengukuran seberapa besar kinerja yang telah dilakukan.
- Permendagri 86 tahun 2017: Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah ada perubahan RPJMD.
- Bila ada penambahan program yang merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra perangkat daerah.
- Kalau tidak dimasukkan dalam Renstra, tidak dapat dievaluasi.
- Cara mengisi *excel performance scoring*:

Kategori	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Program (outcome) pada Tahun 2017 (RP17)		Matriks Kegiatan Kinerja Renstra Program (outcome) Kegiatan (output) Tahun 2017 (RP17)		Target Kinerja dan Anggaran Kerja Program (outcome) Kegiatan (output) yang direvisi				Matriks Kinerja Pada Tahun 2017 (RP17)				Matriks Kegiatan Kinerja dan Anggaran Kerja Program (outcome) Kegiatan (output) yang direvisi		Matriks Kinerja dan Anggaran Kerja Program (outcome) Kegiatan (output) tahun 2017 (RP17) Tahun Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan		Matriks Kegiatan Kinerja dan Anggaran Kerja Program (outcome) Kegiatan (output) tahun 2017 (RP17)	
		S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp	S	Rp

- Pilih program/kegiatan di renstra yang sudah ditagging, sesuaikan tahun target renstra.
- Jumlah persentase rata-rata capaian kerja dan dapat dilihat berapa persen capaian kinerja tiap OPD.
- Dasar interval penilaian: Permendagri 86 tahun 2017.
- Kalau tidak ada indikator kinerja yang benar dalam renstra, maka tidak dapat diukur, capaiannya jadi akan terlihat sangat rendah.

Tanya Jawab

1. Fence – Dishut

- Pertanyaan untuk Pak Doddy: untuk menjelaskan penentuan indikator kinerja, program, capaian program untuk menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan di masa depan.
- Pak Doddy: harus bisa membedakan mana indikator dengan indikator kinerja.
- Indikator ada yang sukar atau mudah diukur
- Indikator itu ukurannya, nilai, dan konsepsinya harus sama.
- Indikator sesungguhnya lekat dengan keseharian pemerintahan
- Indikator antara lain digunakan untuk merencanakan kinerja, menilai kemajuan bisnis, menentukan akar permasalahan, memberikan *reward & punishment*, dsb.
- Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam bentuk keluaran (*output*) di level kegiatan, hasil (*outcome*) di level program, dampak (*impact*) di level sasaran.
- Kriteria Indikator Kinerja
 - a. Spesifik
 - b. Achievable / dapat dicapai
 - c. Relevan
 - d. Menggambarkan sesuatu yang diukur
 - e. Dapat dikuantitatifkan dan diukur

- Konsep Indikator kinerja adalah angka. Pastikan bahwa Indikator Kinerja berawal dari kata-kata “jumlah” kecuali untuk dinas-dinas yang “unpredictable” seperti BPBD
 - Sumber indikator dapat dilihat di Permendagri 86 tahun 2017 atau Permendagri 12 tahun 2020
 - Metode Penetapan Target
 - a. Menganalisis data dan *trend* sebelumnya
 - b. Menganalisis kondisi perekonomian terkini dan proyeksi ekonomi
 - c. Umpan balik dari customer dan/atau stakeholder
 - d. *Focus group discussion* ketika menyusun Renstra, harus dibahas dengan stakeholdernya.
 - Pertumbuhan indikator hanya 0,2% atau 0,01% per tahun, tapi target tidak tercapai.
 - Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), salah satu yang dinilai adalah pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Kalau capaian kinerja tidak tercapai, SAKIP akan rendah.
 - Salah satu cara menyusun indikator:
 - Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Output: jumlah meter kubik air, jumlah penggunaan kwh listrik
 - Bagaimana merumuskan indikator kinerja yang benar?
 - Harus menggunakan prinsip *casecading*. Jika – maka
 - Rumuskan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai, kemudian bagaimana akan mencapainya.
- 2. Imelda – dinas perhubungan**
- Ada Batasan di Permendagri terhadap penamaan program, kegiatan, etc. Kesulitan menemukan penamaan yang cocok dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dicari nomenklatur yang mendekati.
 - Pak Joko: perlu ada penyesuaian antara nomenklatur kegiatan dengan output supaya tidak terlalu melenceng dari output/outcome yang ingin dicapai.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN PENTING

1. Permendagri 90 merupakan aturan yang mengatur tentang nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, dapat dikatakan PMDN 90 mengatur "rumah" program dan keg, agar terjadi sinkronisasi penggunaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan seluruh pemda
2. RPJMD merupakan perencanaan strategis berbasis permasalahan dan kinerja pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah tetap **HARUS** menyusun perencanaan sesuai dengan kinerja yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai "rumah" nya
3. Dalam hal ini, tentukan dahulu kinerja apa yang akan dicapai baru dicari rumahnya, apabila tidak ada rumahnya, maka apabila kinerja yang ingin dilaksanakan merupakan kewenangan daerah, dapat diusulkan melalui mekanisme pemutakhiran.

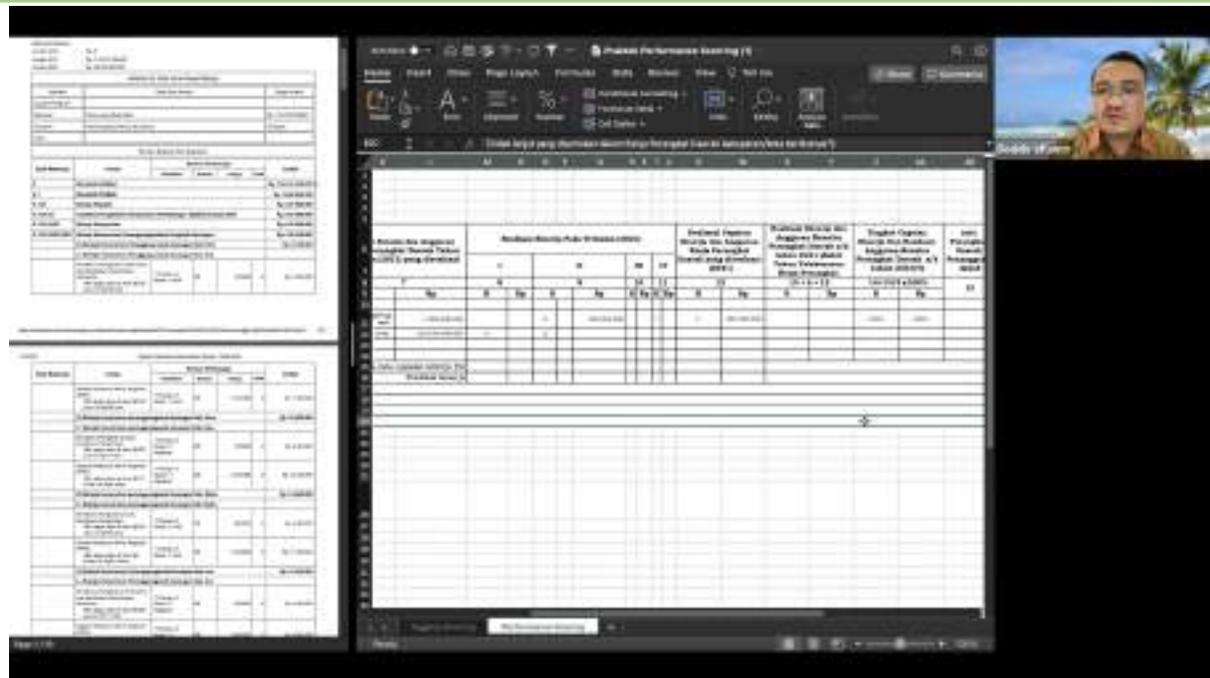
- Tujuan Permendagri 90 tahun 2019 untuk menyelaraskan nomenklatur. Pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "*single codebase*" supaya sama seluruh Indonesia.
 - Tapi ternyata tidak semuanya terakomodir dalam Permendagri 90 tahun 2019
 - Untuk kegiatan yang tidak terakomodir, di tahun ini menampung usulan-usulan pemda untuk pemutakhiran, perubahan kebijakan.
 - Akan ada kemungkinan muncul *library* terkait indikator.
- 3. Sonny – Dinas Kehutanan**
- Berapa persen nilai pagu sub kegiatan dalam kegiatan inti? Bagaimana kalau kegiatan inti lebih kecil daripada kegiatan pendukung
 - Pak Doddy: tidak ada ketetapan pasti.
 - Harapannya dari proses *Budget tagging* ini, pemda Maluku bisa jadi evaluasi juga, sudah proporsional belum penganggarannya.
 - Setelah adanya kajian (*Budget tagging*), menemukan ternyata prosentase belanja inti hanya sebagian kecil dibandingkan belanja subkegiatan bisa jadi *policy input* supaya gubernur mengeluarkan imbauan/SK yang menetapkan bahwa belanja inti harus berapa persen lebih besar dibandingkan belanja subkegiatan.
 - Hal ini dikembalikan kepada otonomi daerah.
 - Pak Joko: pelatihan ini bisa digunakan untuk melihat proporsi penganggaran
 - Menentukan proporsi antara belanja inti dan belanja subkegiatan tersebut penting, namun yang lebih penting adalah apapun jenis belanjanya, perlu diperhatikan ukuran output dan outcome nya.
- 4. Isak Silooy dan Fence – Dinas Kehutanan**
- Klarifikasi penginputan data indikator dalam sistem SIPD yang sistemnya kurang baik, bagaimana konsekuensi bagi OPD yang gagal menginput anggaran pada sistem SIPD tersebut?

- Pak Doddy: tidak terlalu ekspert terkait SIPD, tapi memang sistem dan indikatornya akan selalu mengalami pemutakhiran.
- Apakah di RKPD sudah ada indikator di level program? Kalau sudah ada, transfer antara RPJMD ke dalam dokumen penganggaran yang belum selesai atau ada ketidaksesuaian penginputan data pada SIPD tidak selalu dipermasalahan oleh evaluator.
- SIPD hanya sebagai alat, bukan sesuatu yang mutlak harus diikuti. Yang perlu diikuti adalah kembali ke regulasi yang berlaku.
- SIPD masih baru, tentunya akan ada trial and error.
- Pertanyaan untuk Bappeda: Apakah melakukan pengendalian dan evaluasi triwulanan Renja dan RKPD secara tepat waktu?
- Bappeda: ada
- Sehingga pengisian table performance scoring harapannya akan lebih mudah berdasarkan dokumen evaluasi yang ada.

Sesi Pelatihan *Performance Scoring*

- Menggunakan file excel pengendalian, evaluasi yang telah dibagikan oleh Pak Doddy
- Dokumen yang diperlukan: Renstra, Renja, dan RKA/DPA
- Pak Doddy memberikan contoh cara pengisian lembar *performance scoring* menggunakan dokumen dari dinas PUPR.
- Renstra yang dibawa adalah 2019-2024 yang masih menggunakan judul program yang lama, sedangkan RKA yang dibawa, nomenklatur nya telah menyesuaikan dengan Permendagri 90.
- Dokumen yang dibawa dinas PUPR kurang lengkap (pengisian indikator kinerja yang kurang sesuai dengan tujuan kegiatan, nomenklatur nya berbeda-beda dalam renstra, renja, dan RKA), sehingga tidak dapat dilakukan *scoring*.
- Untuk mengukur kinerja dalam performance scoring, yang dimasukkan dalam kolom realisasi kinerja tiap triwulan adalah program/kegiatan yang telah selesai dilakukan.
- Contoh: Program pembangunan seawall dengan indikator kinerja 39 desa di tahun 2021. Pada triwulan II, baru ada 2 desa yang sudah selesai dibangun seawall maka yang dapat diukur performance nya adalah 2 desa yang telah selesai tersebut walaupun progress telah berjalan di 10 desa lainnya.

Contoh pengukuran performance atas kegiatan pembangunan 1 gedung SMK



- Pengisian kolom realisasi kinerja per triwulan harus didasarkan pada realisasi di lapangan.
- Kalau indikatornya bermasalah, maka tidak bisa mengukur keberhasilan.
- Karena masih banyak permasalahan mengenai indikator kinerja di Renstra, tabel performance scoring dimodifikasi supaya bisa mengakomodasi scoring untuk Renja saja.
- Contoh performance scoring diganti menjadi menggunakan Renstra Dinas Pariwisata yang sudah memiliki indikator kinerja, walaupun belum ada indikator di level programnya.
- Meski demikian, DPA dari dinas pariwisata juga belum memiliki indikator yang tepat.
- Akhirnya, pelatihan dilakukan dengan keterbatasan dokumen yang ada, sekaligus untuk evaluasi bagian-bagian mana yang masih perlu diperbaiki dalam Renja, Renstra, dan DPA masing-masing OPD.
- Contoh Indikator kegiatan yang benar: Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan. Maka targetnya akan ada xxx buah; Bukan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi karena targetnya tidak dapat diukur.
- Presentasi Dinas Pertanian:

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (persentase) Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBS Tahun Kegiatan (Rp) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2021)									
						I			II						
			Angka	satuan	Realisasi Anggaran	Angka	satuan	Realisasi Anggaran	Angka	satuan	Realisasi Anggaran				
11	1101	PROGRAM PERSYARAFAN DAN PENYEMBUHAN SAKITA ODONTOLOGI	Tersedianya sarana Partisipasi yang memadai												
12	1101	110101 Penyediaan bibit ternak dan pakan Pakan Ternak yang Sumbanya dan Ternak Pribumi Lain	Tersedianya bibit ternak kepada masyarakat dalam			1.004.000,00									
13	1101	110102 Pengadaan bibit ternak yang Sumbanya dan Ternak Pribumi Lain	Tersedianya bibit ternak dan sarana Perakibangan Prospektifnya Untuk Persekolahan ternak	1101	Rup	1.004.000,00	0	Rup		100%	Rup	1.004.000,00			

Indikator Kinerja Program (persentase) Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBS Tahun Kegiatan (Rp) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2021)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Prasyarat Easrak yang direalisasi (Rp)	Tingkat Pemanfaatan Anggaran Biaya tahun (2021) (Milyar Rp)	Sisa Pembagian Anggaran Perangkoan	
				I			II						
	Angka	satuan	Realisasi Anggaran	Angka	satuan	Realisasi Anggaran	Angka	satuan	Realisasi Anggaran				
Tersedianya sarana Partisipasi yang memadai													
Tersedianya bibit ternak kepada masyarakat dalam			1.004.000,00							100.000,00	84,82	10%	
Tersedianya bibit ternak dan sarana Perakibangan Prospektifnya Untuk Persekolahan ternak	1101	Rup	1.004.000,00	0	Rup		100%	Rup	100.000,000,00	100%	10%		

- Penggunaan kalimat indikator “tersedianya” seharusnya tidak lagi dilakukan.
- Maluku akan melakukan perubahan RPJMD yang akan diikuti oleh perubahan Renstra untuk menyelaraskan dengan Permendagri 90 dan menyesuaikan dengan situasi Covid-19. Harapannya indikator kinerja dapat diperbaiki.
- Kalau dalam satu kegiatan/subkegiatan punya keluaran yang lebih dari 1, maka penting juga untuk menyantumkan indikator kinerjanya supaya semuanya bisa dinilai performanya.
- Contoh dari dinas pertanian: ada kegiatan pengadaan bibit ternak. Tapi yang menjadi indikator kinerja hanya jumlah bibit ternaknya, padahal dalam kegiatan tersebut ada juga pembelian pakan dan vitamin untuk ternak, pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembuatan kandang, dll. Hal-hal tersebut juga perlu dicantumkan indikator kinerjanya supaya apa yang sudah dilakukan nantinya dapat terukur.
- Indikator itu bisa mengungkapkan jenis belanjanya atau apa yang bisa menggambarkan keluaran dari kegiatan yang dimaksud.

- Karena ada permendagri 90, Subkegiatan bisa jadi bukan bagian terkecil dari apa yang dilakukan Pemda. Sehingga, tidak hanya 1 subkegiatan, tapi kegiatan dan program bisa memiliki lebih dari 1 indikator.

Desiana Samosir – Fasilitator

Rencana Tindak Lanjut:

- Madani akan berkoordinasi dengan Bappeda untuk *report back* mengenai kegiatan pelatihan yang telah dilakukan.
- Madani akan berkoordinasi dengan Kadis OPD lainnya untuk rencana bimbingan teknis lainnya, untuk lanjutan kegiatan *Green Budget tagging* sekaligus pemutakhiran Renja dan Renstra Pemda Maluku dengan Pak Joko dan trainer lainnya.

Pak Joko – Trainer

- Kata penutup: berharap semoga kegiatan dua hari ini tidak hanya sekedar menerima undangan dan menggugurkan kewajiban, namun menimbulkan *curiosity* baru mengenai hal-hal yang selama ini dikerjakan dengan *business as usual*. Ada pembaruan-pembaruan yang bisa dilakukan oleh tiap OPD untuk memperbaiki kinerja masing-masing.
- Berharap setelah kegiatan ini masing-masing OPD dapat mempraktikkan ilmu yang didapat secara mandiri, tidak lagi bergantung dengan fasilitator.
- Di daerah lain yang selama ini telah diberi pelatihan GBT biasanya membentuk Kelompok Kerja bersama (WA group yang dikelola oleh Bappeda) untuk saling bertukar ilmu secara terus menerus dan rencana untuk menyebarkan ilmu ini.
- Harapannya metodologi dapat dijadikan trobosan baru di dalam mewujudkan visi misi menciptakan Maluku yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Notes to look for

- Menyediakan link di gdrive untuk masing-masing dinas untuk upload dokumen-dokumen. Supaya pada saat pelatihan bisa langsung dimulai, tanpa menunggu mencari dokumen terlebih dahulu
- Link Gdrive juga akan diisi materi yang dipaparkan oleh narasumber sehingga peserta dapat dengan mudah mengaksesnya.

Dokumentasi

